

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN SECARA BERKELANJUTAN MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Hafiz Elfiansya Parawu

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak swasta yang diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Implementasi kebijakan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat sudah pula dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros (SBM). Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan masyarakat adalah daerah operasi PT. SBM di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga. Lokasi penelitian pada area operasi PT. SBM di Desa Baruga melalui jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian implementasi kebijakan CSR PT. SBM di Desa Baruga yang dianalisis berdasarkan konten dan konteks kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. SBM masih dominan terlaksana dalam bentuk kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan (*charity and philanthropy*), namun dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan harus semakin terus digiatkan dan ditingkatkan agar semakin mampu memandirikan, mensejahterakan, dan memberdayakan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan, khususnya masyarakat Desa Baruga.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan publik, corporate social responsibility, pemberdayaan masyarakat masyarakat*

PENDAHULUAN

Perusahaan pada hakikatnya merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan yang keberadaannya tidak akan terlepas dari masyarakat dan lingkungan, sehingga sudah seharusnya, jika perkembangan suatu perusahaan memerhatikan perkembangan masyarakat dan lingkungan di sekitar area operasi perusahaan, bukan hanya mengejar *profit* (keuntungan) semata. Konsep *Triple Bottom Lines* atau 3P (*Profit, Planet, People*) yang digagas Elkington pada tahun 1998 dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi (*profit*) belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) secara berkelanjutan (*sustainability*) (Suharto, 2010: 5).

Keterkaitan erat antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas inilah yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Harapan dari ditetapkannya kebijakan ini tentunya agar perusahaan dalam menjalankan aktifitas usahanya tidak mengejar *profit* semata, namun juga berkewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkesinambungan, khususnya pada area operasi perusahaan.

CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pihak swasta (Dobers dan Halme, 2009: 238; Wahyuningrum, dkk, 2013: 110;), yang diyakini dapat menjadi pendekatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia (Suharto, 2010: 65), namun, hasil implementasi kebijakan CSR di Indonesia pada kenyataannya belumlah begitu menggembirakan bila dikaitkan dengan aspek keberdayaan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan. Masih banyak perusahaan besar mengeluarkan dana untuk berbagai kegiatan sosial yang tanpa fokus, arah, dan keberlanjutan program yang jelas (Suharto, 2010: 56). Program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat, lebih ironisnya lagi, tidak sedikit yang dijadikan ladang manipulasi dan korupsi (Mardikanto dan Soebiato, 2013: iv). Banyak perusahaan yang mengklaim telah mempraktekkan pemberdayaan masyarakat, padahal yang mereka lakukan hanyalah program-program yang seadanya, karitatif, tidak memberdayakan, dan tak lebih dari menggugurkan kewajiban saja (Suharto, 2010: xxii-xxiii).

Implementasi kebijakan CSR berbasis pemberdayaan masyarakat sudah pula dilaksanakan oleh PT. Semen Bosowa Maros (SBM) sebagai salah satu *private sector* di Indonesia Timur sejak tahun 1990 dalam bentuk *community development* (pemberdayaan masyarakat) melalui Divisi Comdev yang sejak tahun 2015 berubah menjadi *Environment and Community Development Department*. Daerah utama yang dijadikan sasaran CSR berbasis pemberdayaan masyarakat adalah daerah operasi PT. SBM di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. PT. SBM sebagai industri semen dengan kapasitas 1,8 juta ton per tahun sudah memberi perhatian terhadap masyarakat sekitar pabrik melalui berbagai upaya pendekatan yang proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat aktifitas perusahaan. Keberadaan Divisi *Environment and Community Development Department* dalam menjalankan CSR PT. SBM merupakan terobosan yang sangat efektif dalam meminimalisir benturan dengan budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi agar senantiasa terpelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar serta guna meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terlihat bahwa peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui implementasi kebijakan CSR. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: “Bagaimanakah implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga secara berkelanjutan?”.

Implementasi Kebijakan Publik

Dunn (2003: 56), memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai *policy implemetation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretical*. Konteks implementasi kebijakan baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Meter dan Horn (1975), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Implementasi kebijakan (Edwards III, 1980: 9-11), dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Sedangkan menurut Meter dan Horn (1975), terdapat 5 (lima) variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Komunikasi

antarorganisasi dan penguatan aktivitas; (4) Karakteristik agen pelaksana; dan (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Terdapat 2 (dua) variabel besar yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Variabel konten kebijakan, meliputi: (1) *Interest affected* (pengaruh berbagai kepentingan); (2) *Type of benefits* (jenis manfaat); (3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai); (4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan); (5) *Program implementor* (pelaksana program); dan (6) *Resources committed* (berbagai sumber daya yang dikerahkan). Variabel konteks implementasi, meliputi: (1) *Power, interest and strategi of actor involed* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat); (2) *Intitution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa); dan (3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana).

Terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*); (2) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*); dan (3) Variabel di luar kebijakan/ variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan menggunakan model Grindle (1980) untuk menganalisis implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Pemilihan model Grindle (1980) didasarkan oleh adanya variabel konten kebijakan dan konteks implementasi yang dapat mencakup semua variabel yang dikemukakan oleh model implementasi kebijakan yang lain.

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan konsep yang masih terus berkembang, sehingga CSR memiliki beraneka ragam definisi. Definisi tunggal serta kriteria spesifik mengenai konsep CSR belum ada dikarenakan implementasi dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan juga berbeda-beda. Anatan (2009: 2), mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. *The European Commission* (Wiwoho, 2008: 110), mendefinisikan CSR bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi dilaksanakan secara sukarela dan ada dorongan yang tulus dari dalam, serta merupakan investasi untuk lingkungan dan *stakeholders*.

World Business Council for Sustainable Development (Rahadhini, 2010: 14), mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menyiratkan makna bahwa CSR harus dilaksanakan secara terus menerus agar tercipta pembangunan berkelanjutan yang merupakan inti dari CSR, sehingga elemen *profit*, *people*, dan *planet* menjadi satu kesatuan utuh yang dapat memberikan manfaat yang besar dan menyentuh semua aspek kehidupan.

Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan secara Berkelanjutan

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-*

based development). Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 40). Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995).

CSR dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga. Implementasi kebijakan CSR dalam bentuk pembangunan masyarakat (*community development*) atau pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan bentuk implementasi kebijakan CSR utama yang harus dilakukan oleh perseroan atau perusahaan, tak terkecuali yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumber daya alam (Suharto, 2010: 37).

METODOLOGI

Lokasi penelitian pada area operasi PT. Semen Bosowa Maros (SBM) di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu: data primer dan sekunder. Fokus penelitian dalam penelitian ini, adalah implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan peneliti, dan *triangulasi* sumber. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang merupakan instrumen kunci (*key instrument*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif dari Miles and Huberman (1992: 20), yaitu: (1) Reduksi data (*data reduction*); (2) Penyajian data (*data display*); dan (3) Penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Grindle (1980):

a. Variabel konten kebijakan

1) *Interest affected* (kepentingan kelompok sasaran)

Aspek ini terkait dengan pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh suatu kebijakan harus mampu mengakomodir tujuan dari kebijakan tersebut. Sasaran utama implementasi kebijakan CSR PT. SBM adalah masyarakat miskin dan lingkungan Desa Baruga. Bentuk bantuan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM dominan masih terealisasi dalam bentuk *charity* dan *philanthropy*, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur desa, memberi lapangan pekerjaan, dan kegiatan sosial-keagamaan. Adapun dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana namun belum menjadi program yang utama. Sehingga, implementasi kebijakan CSR PT. SBM belum sepenuhnya berhasil mengakomodir sejumlah kepentingan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian pihak PT. SBM dalam mengakomodir kepentingan masyarakat Desa Baruga pada setiap aktivitas CSR yang dilakukan harus semakin ditingkatkan. PT. SBM melalui *Environment and Community Development Department* harus semakin peka dan peduli pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui implementasi kebijakan CSR-nya, baik dalam bentuk pemberian bantuan dan sumbangan sosial, terkhusus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta terkait masalah penanganan polusi dan limbah pabrik serta ketersediaan air bersih di Desa Baruga

2) *Type of benefits* (jenis manfaat)

Aspek ini terkait dengan jenis manfaat yang didapatkan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah suatu implementasi kebijakan harus mampu memberikan manfaat secara kolektif terhadap kelompok sasaran agar mendapatkan dukungan partisipasi dari kelompok sasaran tersebut. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di Desa Baruga. Selama ini, implementasi kebijakan CSR PT. SBM telah memberi sejumlah manfaat kepada masyarakat, namun belum secara adil dan merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Baruga, utamanya yang tergolong keluarga prasejahtera.

Implementasi kebijakan CSR PT. SBM di Desa Baruga, meskipun sudah memberi sejumlah manfaat bagi masyarakat Desa Baruga, namun harus diupayakan agar pemerataan manfaat keberdayaan itu dapat lebih dinikmati lagi secara adil dan merata oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat dalam kategori prasejahtera. Pihak *Environment and Community Development Department* PT. SBM harus segera berkoordinasi dengan pihak aparat desa dan mitra TPKS-BB agar pendataan terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga prasejahtera dapat dilakukan secara tepat, agar tujuan utama dari implementasi kebijakan CSR PT. SBM guna memberi manfaat yang besar dan luas bagi keberdayaan masyarakat Desa Baruga dapat terwujud

3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Aspek ini terkait dengan perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah sebuah implementasi kebijakan harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik kepada kelompok sasaran kebijakan. Harapan dari implementasi kebijakan CSR PT. SBM adalah untuk memberi perubahan yang lebih baik pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Desa Baruga. Namun, capaian dari perubahan yang dikehendaki dari implementasi kebijakan CSR PT. SBM tersebut nampaknya belum berhasil memberi dampak perubahan yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Desa Baruga.

Jika saja selama ini implementasi kebijakan CSR PT. SBM lebih terfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, maka besar kemungkinan akan berhasil memberi dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di Desa Baruga. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM yang kini sudah mulai melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, harus semakin digiatkan dan ditingkatkan agar dapat memberi sejumlah keterampilan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Desa Baruga, sehingga akhirnya terwujud dampak perubahan pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Aspek ini terkait dengan kedudukan pengambil kebijakan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah kedudukan pengambilan keputusan secara terpusat

akan mempermudah implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, pihak yang dilibatkan dalam pengusulan program CSR PT. SBM adalah Kepala Desa Baruga dan mitra TPKS-BB. Pemilik kapasitas utama dalam menentukan program yang akan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM bersifat sentralistik pada pihak *top management* yang menindaklanjuti keputusannya kepada bidang keuangan untuk kemudian dilaksanakan oleh personil *Environment and Community Development Department* dan mitra TPKS-BB.

Pada penentuan kegiatan CSR yang akan dilaksanakan, sebaiknya pihak *Environment and Community Development Department* PT. Semen Bosowa Maros dan TPKS-BB dapat menjadi fasilitator atau pendamping yang bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menggagas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Masyarakat sendirilah yang akhirnya memutuskan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak *Environment and Community Development Department* PT. Semen Bosowa Maros dan TPKS-BB cukup mengajukan usulan masyarakat tersebut kepada pihak *top management* PT. SBM

5) *Program implementor* (pelaksana program)

Aspek ini terkait dengan kejelasan pelaksana program dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah para implementor kebijakan harus jelas dan diketahui oleh kelompok sasaran kebijakan. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga telah melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai pihak PT. SBM, mitra TPKS-BB, aparat desa, kecamatan, maupun kabupaten, dan juga sebagian masyarakat Desa Baruga. Para implementor yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan diketahui secara jelas keberadaanya oleh masyarakat.

Para implementor yang terlibat telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM. Kemampuan pelaksana program dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya akan memengaruhi keberhasilan suatu implementasi program. Semakin para implementor kebijakan memiliki aspek kognisi yang baik, maka implementasi suatu kebijakan tersebut akan berpotensi besar untuk mencapai keberhasilan

6) *Resources committed* (berbagai sumber daya yang dikerahkan)

Aspek ini terkait dengan dukungan sumber daya yang memadai dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dimana idealnya adalah dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga sudah menyediakan dukungan SDM dan sumber daya fasilitas kegiatan yang memadai. Namun, belum menyediakan dukungan sumber daya pendanaan yang memadai, baik dalam bentuk bantuan dana maupun bentuk lainnya.

Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga, belum menyediakan dukungan sumber daya finansial yang memadai. Hal ini terungkap dari adanya sebagian masyarakat Desa Baruga yang masih kerap mengeluhkan keterlambatan bantuan dan belum adanya keterbukaan dari pihak perusahaan terkait alokasi dan pemanfaatan dana CSR mereka dalam setiap tahunnya kepada masyarakat (publik). Masalah dukungan sumber daya finansial yang belum memadai sehingga menimbulkan keterlambatan bantuan CSR PT. SBM kepada masyarakat Desa Baruga,

tentunya harus segera dibenahi, karena akan menghambat jalannya implementasi kebijakan

b. Variabel konteks implementasi

1) *Power, interest and strategi of actor involed* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Aspek ini terkait dengan kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor kebijakan yang tersusun dengan baik lebih memungkinkan suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga telah melibatkan para aktor implementasi yang memiliki tingkat kemampuan baik, telah melibatkan para aktor implementasi yang menunjukkan kepentingan dalam mendukung dan menyukseskan implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dan selalu menerapkan strategi implementasi dengan melibatkan peran aktif berbagai pihak, khususnya partisipasi masyarakat.

Pihak *Environment and Community Development Department* PT. SBM selalu menerapkan beberapa strategi pendekatan agar implementasi kebijakan CSR di Desa Baruga dapat mencapai tujuan. Strategi dengan membentuk kemitraan bersama TPKS-BB, menggiatkan partisipasi warga, dan menysasar kaum ibu dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penanaman palawija di pekarangan rumah, merupakan beberapa strategi pendekatan yang cukup sukses dilakukan.

2) *Intitution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan penguasa)

Aspek ini terkait dengan karakteristik pemerintah dan lembaga yang sedang berkuasa dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM. Keberpihakan lembaga dan penguasa yang sedang berkuasa terhadap kebijakan akan mendorong keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan pihak PT. SBM sendiri sudah cukup menunjukkan keberpihakan dan komitmen mereka, namun keberpihakan dan komitmen kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi perusahaan ini masih harus terus ditingkatkan dan direalisasikan, khususnya pada implementasi kebijakan CSR yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Semakin baiknya karakteristik PT. SBM terkait perhatian dan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar area operasi perusahaan, maka akan semakin menunjang keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. SBM, dan secara otomatis akan meningkatkan pula kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan di Desa Baruga dan sekitarnya.

3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran)

Aspek ini terkait dengan tingkat kepatuhan dan daya tanggap para implementor kebijakan dalam implementasi kebijakan CSR PT. SBM. Implementasi kebijakan dapat berhasil jika ada kepatuhan dan daya tanggap dari para implementor. Implementasi kebijakan CSR PT. SBM dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa Baruga nampaknya para implementor kebijakan sudah menunjukkan tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang baik. Daya tanggap para personil *Environment and Community Development Department* PT. SBM, mitra TPKS-BB, dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan CSR, telah menunjukkan sikap yang aktif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Desa Baruga. Sikap ini harus semakin ditingkatkan, terlebih pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian implementasi kebijakan CSR PT. SBM di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros yang dianalisis berdasarkan konten dan konteks kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT. SBM sudah terlaksana dengan cukup baik dalam bentuk kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan (*charity and philanthropy*), namun dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan harus semakin terus digiatkan dan ditingkatkan agar semakin mampu memandirikan, mensejahterakan, dan memberdayakan masyarakat di sekitar area operasi perusahaan, khususnya masyarakat Desa Baruga. Kini, saatnya pemerintah daerah, masyarakat, dan elemen terkait untuk terus mendorong dan memotivasi pihak PT. SBM agar terus meningkatkan kegiatan CSR-nya yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. 2013. *Kabupaten Maros dalam Angka*
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press
- Chandler, Ralph C and Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Singapore: John Wilwy & Sons
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gajah Mada University Pres
- Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mazmanian, Daniel H. and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins
- Meter, Donald Van, and Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society 6. London: Sage
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- _____ 2010. *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas

Hasil Penelitian, Jurnal, dan Artikel Ilmiah:

- Anatan, L. 2009. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia, (Online), (<http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220>,

- Dobers, Peter and Minna Halme. 2009. Editorial Corporate Social Responsibility and Developing Countries. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt* 16 (p. 237-249)
- Rahadhini, M.D. 2010. Peran Public Relations dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 1: 11-21
- Wiwoho, Jamal. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) Ditinjau dari Aspek Sejarah, Falsafah, dan Keutungan serta Kendalanya. *Jurnal Corporate Social Responsibility (CSR)* Vol. 37 No. 2